

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT (STUDI PASAR WISATA SAMARANG)

Erna Rustiana^{1*}, Ikeu Kania², Anisa Nisrina³

^{1,2,3,} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut, Jawa Barat, Indonesia

*Korespondensi: ernarustiana@fisip.uniga.ac.ad

ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi upaya pengelolaan pasar oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka memenuhi standar kenyamanan bagi para pembeli maupun pedagang di pasar, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Permasalahan yang muncul adalah belum terbitnya landasan hukum yang jelas dalam tata kelola pasar wisata, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas pasar, dan pengelolaan pasar masih belum baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Garut dengan objek Pasar Wisata Samarang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi penataan dan pembinaan pasar tradisional belum dilaksanakan secara optimal, dilihat dari sasaran dan tujuan yang belum memberikan arah kebijakan yang jelas, belum didukung sumber daya yang handal dan kompeten, serta belum adanya pembinaan yang baik kepada para pedagang terkait optimalisasi pemanfaatan pasar wisata Samarang sebagai *center of market* Kabupaten Garut. Kesimpulannya faktor penghambat implementasi kebijakan disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan, adanya rangkap jabata, proses rekrutmen pegawai belum dijalankan secara professional, dan dibutuhkan pembinaan yang jelas kepada pedagang dan pembeli tentang pengelolaan pasar yang berkualitas.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Penataan; Pembinaan; Pasar Wisata

ABSTRACT

The background of the research is the efforts of market managed by the Garut Regency government in order to meet the standard of comfort for buyers and traders in the market, as well as to improve the community's economy so that it has an impact on the welfare of the community in the economic field. The problems that arise are that there is no clear legal basis for tourism market management, the lack of public awareness to maintain market facilities, and market management is still not good. This study aims to determine the implementation of the policy of structuring and fostering traditional markets in Garut Regency with the object of the Samarang Tourism Market. The research method uses a descriptive qualitative approach, data collection is done through observation, interviews, and documentation. The results of the study explain that the implementation of

structuring and fostering traditional markets has not been carried out optimally, seen from the targets and objectives that have not provided clear policy directions, and have not been supported by reliable and competent resources. There is no better guidance to traders regarding optimizing market utilization—Samarang tourism is the center of the market in Garut Regency. In conclusion, the inhibiting factors for policy implementation are the lack of public awareness about cleanliness, the existence of multiple positions, the employee recruitment process has not been carried out professionally, and clear guidance is needed to traders and buyers regarding quality market management.

Keywords: *Arrangement; Coaching; Policy Implementation; Tourist Market*

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin pesat, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat yang terbukti dengan banyaknya usaha baru atau muncul di tengah masyarakat. Apabila dilihat menurut kelas pelayanannya, pasar dapat digolongkan menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern (Priatna & Supiandi, 2021). Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 70 Tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern menjadi salah satu pedoman yang dipakai untuk meningkatkan kualitas pasar.

Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah (Br. Ginting, 2018). Guna mewujudkan kualitas ruang berkelanjutan yang sesuai dengan rencana tata ruang, maka diperlukan instrumen pengendalian yang mencakup seluruh aspek penataan ruang (Ikmal & Alam, 2019).

Peranan pasar tradisional jika dikelola dengan baik berpotensi memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan

karena menjadi lapangan pekerjaan terutama puluhan juta pedagang kecil dan tenaga angkut. Namun keberadaan pasar tradisional saat ini terancam dengan pertumbuhan pasar dan toko modern yang berkembang sangat pesat (Ariani, et al., 2019). Kondisi pasar tradisional umumnya tidak terkelola dengan baik sehingga kalah bersaing dengan pasar-pasar modern yang semakin menjamur (Basri, 2019).

Upaya pemerintah Kabupaten Garut dalam pengelolaan pasar untuk memenuhi standar kenyamanan bagi pembeli maupun pedagang untuk menstimulasi perekonomian masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan. Seiring perubahan *life style* dan zaman maka keberadaan pasar tradisional diubah menjadi pasar lebih modern berbasis wisata yang menjadi harapan masyarakat dan upaya pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk lebih meningkatkan kenyamanan dan pendapatan. Selarah dengan pendapat Badudu (Suwandi & Sutrisno, 2018) bahwa pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik

Dengan mempertimbangkan potensi wisata dan strategisnya jalur perjalanan yang dilalui oleh para wisatawan maka

Kecamatan Samarang Kabupaten Garut dijadikan salah satu alasan untuk dibangunnya objek wisata buatan seperti halnya Pasar Wisata Samarang. Akan tetapi, pemerintah daerah Kabupaten Garut belum mempunyai dasar hukum yang belum jelas tentang keberadaan bangunan pasar wisata tersebut.

Pasar yang dibangun megah dan representatif ini memiliki 584 kios dan 641 los bagi para PKL yang diharapkan dapat menjadi penunjang untuk kemajuan pasar, pariwisata dan turut menjadi tujuan destinasi wisata. Selain itu rendahnya unit kerja yang bertugas dalam melaksanakan pengawasan, tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan, pengarahan dan edukasi kepada masyarakat maupun kepada para pedagang.

Terbukti bahwa implementasi dari kebijakan adanya pasar wisata belum dilaksanakan dengan mempertimbangkan prosedur yang ada. Menurut (Agustino, 2016), “implementasi dari kebijakan merupakan upaya memandu tindakan yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan guna mencapai keberhasilan tujuan dari adanya kebijakan”.

Hasil observasi dilapangan menunjukkan beberapa fenomena yang terjadi diantaranya: 1) kurangnya pemahaman pedagang mengenai aturan pengelompokkan barang dagang yang menimbulkan kondisi yang tidak tertib dan teratur, 2) kurangnya kesadaran kebersihan di lingkungan pasar baik oleh pedagang maupun pengunjung pasar, 3) kurangnya pembinaan bagi pedagang untuk meningkatkan kompetensi, 4) tugas pokok dan fungsi pengelola belum terlaksana sepenuhnya sehingga menghambat proses pengembangan pasar wisata yang optimal.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk melakukan eksplorasi dalam memahami gejala penataan dan pembinaan pasar tradisional di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Sumber data digunakan adalah primer dan sekunder, adapun sumber primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada dinas pengelola pasar samarang, para pedagang di pasar wisata, dan pengunjung pasar wisata. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, literatur dan dokumen penunjang lainnya yang berkaitan dengan kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Analisis data menggunakan Model Spradley dengan tahapan analisis domain (gambaran umum), analisis taksonomi (mengkaji fokus masalah), analisis komponensial (perbandingan), dan analisis tema kultural (mencari hubungan dan menarik kesimpulan).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, baik berupa undang-undang, ketetapan, keputusan, peraturan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sesuai dengan uraian pada tinjauan pustaka, Model implementasi yang digunakan dari teori Van Horn dan Van Metter dari bukunya (Agustino, 2016)

menjelaskan beberapa indikator yang mendukung proses implementasi.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran tujuan diukur dari seberapa banyaknya kelompok pedagang mengetahui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2013 tentang pengelompokan barang dagangan. Apabila diamati di lapangan, pedagang yang tidak paham akan aturan lebih besar jumlahnya daripada yang paham, hal ini dilihat dari penataan penjual yang menjajakan dagangannya pada sembarang tempat, tidak sesuai dengan penataan yang sudah dilakukan oleh pengelola pasar, akibatnya menimbulkan kerumitan.

Selain itu tidak ada acuan atau payung hukum sebagai pondasi dalam mengatur penataan pasar, pada permendagri hanya menjelaskan sistem pengelompokan barang dagangan saja tidak dengan pengelolaan pasar, bagi penerapan di Pasar Wisata cukup rumit karena adanya perbedaan cara pengelolaan dengan pasar tradisional pada umumnya.

Pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa fasilitas yang ada di pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tangga yang diperuntukkan untuk memberi kenyamanan pengunjung dipakai sebagai lapak dagang para PKL, *price board* atau daftar harga yang tidak berfungsi baik menjadi hiasan pasar, jalan untuk pengunjung difabel beralih fungsi menjadi tempat parkir.

Para pengunjung menyayangkan keberadaan pasar wisata Samarang hanya menjadi bangunan baru dengan kondisi lama, tidak ada perubahan yang mulainya tujuan yang diharapkan bisa menjadi icon pariwisata pemerintah Kabupaten Garut.

b. Sumber Daya (Manusia & Finansial)

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mengenai sumber daya manusia UPTD Pasar sebagai pengelola yang terjun langsung dilapangan bertanggung jawab kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Garut.

Kepala Disperindag dan ESDM Kabuapten Garut mengatakan bahwa, kondisi SDM pada unit kerja tidak memiliki kriteria pegawai sebagaimana lembaga lain. Proses rekrutmen pegawai tidak didasarkan pada sistem yang jelas, pemilihan masih dilakukan berdasarkan ikatan kekeluargaan (dinasti politik), kriteria pendidikan tidak menjadi acuan, sehingga hal ini menimbulkan ketidak profesionalan petugas, kurangnya kompetensi petugas dan kurangnya kapabilitas para petugas pelaksana.

Selain SDM, sumber daya finansial menjadi salah satu sumber daya penunjang yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran. Karena, mau tidak mau, sumber daya ini menjadi persoalan pelik merealisasikan apa yang hendak dituju tujuan kebijakan publik.

Dalam implemenatsi program revitalisasi pasar ini, anggaran dana untuk pembangunan pasar ini menghabiskan dana sebesar 27 Miliar yang dikeluarkan dari APBD Kabupaten Garut yang menjadi program unggulan dari “Amazing Garut”.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat pelaksana pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Berdasarkan observasi yang dilakukan pembagian tugas dan penerimaan tanggung jawab dalam pengelolaan pasar ini terlihat jelas pada

garis kewenangan yang tergambar di struktur organisasi.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Garut bertanggung jawab penuh kepada Bupati selaku pemimpin daerah serta melaksanakan, mengatur dan mengendalikan program di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral.

d. Sikap atau Kecenderungan

Sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Menurut Van Metter dan Van Horn (dikutip dari Agustino, 2016) bahwa ada beberapa alasan mengenai tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya yang bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

Berdasarkan hal tersebut instansi yang bersangkutan dalam hal pengelolaan pasar memahami akan kebijakan yang berlaku terbukti dari terjalinnya komunikasi dan pemahaman pegawai di instansi maupun kelompok masyarakat yang terlibat.

e. Komunikasi antar organisasi dan pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya

kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Menurut Van Metter & Van Horn (dikutip dari Agustino, 2016), bahwa prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan hal-hal tersebut. Semakin sering dan baik dalam menjalin koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi begitupun sebaliknya.

Berdasarkan penuturan pegawai Unit Pelaksana Teknis di UPTD Pasar Wisata Samarang berkaitan dengan komunikasi yang terjalin antara organisasi mengatakan bahwa, "Perihal komunikasi kita cukup baik, baik antara UPTD dengan DISPERINDAG, maupun UPDAT terhadap paguyuban pasar (Ikatan Warga Pasar/IWAPA), karena selama ini belum ada miskomunikasi antara kami" (Wawancara 18 Desember 2020, 09:12 WIB).

Komunikasi yang terjalin dalam implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar wisata cukup baik, sesuai dengan hasil pernyataan dari para narasumber memiliki kesamaan bahwa komunikasi antar unit yang ada sudah terjalin baik, koordinasi dengan para pemangku kepentingan pun sudah berlangsung sejak pasar wisata mulai diberlakukan.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan yang diterapkan oleh Van Metter dan Van Horn mengenai sejauh mana lingkungan

eksternal mendukung keberhasilan kebijakan diantaranya dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2) Lingkungan Ekonomi

Penataan dan pembinaan ini juga berdampak pada kondisi ekonomi para pedagang, menurut salah satu pedagang yang berjualan di lantai dasar menyampaikan dengan adanya pasar wisata samarang pendapatan pedagang bisa meningkat, walaupun tidak begitu signifikan, karena kondisi pasar lebih nyaman, pembeli juga ikut bertambah.

Sedangkan, bagi para pedagang yang berjualan di lantai 2 kondisi dagangannya mulai sepi, akibat dari banyak konsumen malas untuk naik ke lantai atas, mereka lebih senang berbelanja di lantai dasar, hal ini menyebabkan pendapatan para pedagang yang berjualan di lantai 2 mengalami penurunan.

3) Lingkungan Sosial

Salah satu instrumen lingkungan sosial yaitu masyarakat. Khusus dalam penelitian ini adalah pengunjung pasar. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Atin salah satu pengunjung Pasar Wisata Samarang mengatakan: "Menurut ibu mah, pasar ini teh bagus tapi kotor dan kurang ketata lah, ya mudahan mudahan harapan saya pasar ini dapat lebih baik lah pengelolaannya" (Wawancara dengan Ibu Atin, Desember, 10:21).

Dari pernyataan tersebut bahwa kebersihan dan tata kelola pasar yang baik merupakan harapan nyata masyarakat sebagai salah satu tolak ukur kenyamanan bagi mereka. Maka, dengan payung hukum yang jelas pasar ini menjadi center of market di Kabupaten Garut.

4) Lingkungan Politik

Instansi pemerintah merupakan salah satu yang termasuk dalam lingkungan politik. Menurut penuturan Bpk Sasa Selaku Kasi Pengelolaan Pasar Bupati Kabupaten Garut mendukung penuh atas pembangunan serta pengelolaan yang dibawah oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Energi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan politik turut mendorong keberhasilan program ini. Karena program tersebut merupakan rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.

5) Faktor Penghambat Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional di Pasar Wisata Samarang sebagai berikut.

- a. Kurangnya pemahaman pedagang terhadap aturan pengelompokkan barang dagang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013.
- b. Kebersihan pasar yang tidak terjaga, masyarakat belum memiliki kesadaran pentingnya kebersihan lingkungan yang baik untuk menjaga kenyamanan berbelanja.
- c. Pembinaan bagi para pedagang masih kurang. Pembinaan dalam pengelolaan pasar tentu sangat penting menjadi nilai tambah bagi para pedagang dalam meningkatkan penjualan, tanpa adanya pembinaan yang baik para pedagang tidak akan mampu bersaing dengan pasar modern lainnya secara universal.

Tugas pokok dan fungsi pengelola masih belum dilaksanakan sebaik mungkin, seperti diantaranya petugas masih belum paham mengenai fungsi dan tugas organisasi, diskresi akibat pemimpin tidak memiliki hubungan baik dengan orang yang seharusnya menjalankan fungsi, terjadi rangkap jabatan akibat SDM yang kurang, adanya tumpang tindih jabatan, dan proses rekrutmen tidak berjalan efektif

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil pengamatan dilapangan mengenai Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dengan Studi Kasus Pasar Wisata Samarang Kabupaten Garut, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, implementasi penataan dan pembinaan pasar sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 belum memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan pasar wisata samarang dan belum mencapai standar dari sasaran kebijakan.
2. Sumber daya, penatan dan pembinaan pasar wisata samarang sejauh ini penyediaan SDM masih belum dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, proses rekrutmen dan kualifikasi pendidikan para pegawai belum menjamin ketersediaan pegawai yang kompeten dan profesional.
3. Karakteristik agen pelaksana, Komunikasi, pada pelaksanaannya proses komunikasi sudah berjalan

dengan baik, proses koordinasi dengan instansi lain dan organisasi lain yang juga ikut berkontribusi sudah dijalankan dengan baik.

4. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, implementasi penataan dan pembinaan pasar wisata samarang perlunya dukungan kebijakan yang jelas sebagai payung hukum pelaksanaan penataan pasar samarang, kedepannya bisa menjadi center of market bagi Kabupaten Garut dan bisa ditiru oleh pasar-pasar tradisional lainnya.
5. Faktor penghambat implementasi disebabkan oleh kesadaran masyarakat tentang kebersihan yang kurang, adanya rangkap jabatan, proses rekrutmen pegawai belum dijalankan secara profesional dan dibutuhkan pembinaan yang jelas kepada masyarakat tentang pengelolaan pasar yang berkualitas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan. *Jurnal Admistrasi Publik*, 1-2.
- Anggraini, G. (2017). Standarisasi Penataan Pasar Tradisional di Indonesia (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Kota Semarang). *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 12-22.
- Ariani, N. M., Putriadi, S., Diantini, A., Fitriani, E., Junio, I. P., & Suastini, K. E. (2019). Eksistensi Pasar Tradisional Di Tengah Persaingan Dengan Pasar Modern Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(2), 125–133.

- Ariyani, D. N. (2019). Penataan Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia Berdasarkan Teori "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung". *Jurnal Dinamika Manajemen*.
- Basri, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Palembang. *Jurnal Administrasi Publik*, 23(02), 37–50.
- Br. Ginting, S. Y. (2018). Keberadaan Minimarket Alfamart dan Indomaret Kaitannya Dengan Tingkat Penghasilan Pedagang Tradisional di Wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. *JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 3(1), 67.
- Gufron, A. (2014). Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Wisata 46 dan Pasar Pasar Wisata Cibiru, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru. *Jurnal Patanjala*, 269-284.
- Iqbal, M. M. (2017). Implementasi Kebijakan tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengelolaan Pasar Tradisional serta Toko Modern. *Jurnal Pemikiran Administrasi Publik dan Bisnis, Sosial dan Politik*, 28-37.
- Ikmal, M., & Alam, S. M. (2019). Kebijakan Zonasi dan Tata Ruang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 20.
- Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati No.67 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Garut
- Peraturan Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern
- Priatna, A., & Supiandi, G. (2021). Analisa Potensi Bersaing Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(2), 251-284.
- Natsir, M. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 64-71.
- Suwandi, J., & Sutrisno, B. 2.–6. (2018). Model Pembinaan PKL di Kota Surakarta dengan Pendekatan Edukasi Lewat Bimbingan dan Penyuluhan (Upaya Mendukung Program Aksi Kota Kreatif). *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 28(2), 54-62.
- Toni, A. (2013). Eksistensi Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Pasar Modern di Era Modernisasi. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*.